

JURNAL HUKUM

**PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PASAL 51 AYAT (3) UNDANG
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG
KETENAGALISTRIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KETENAGALISTRIKAN DI PT PLN (PERSERO) WILAYAH
SULUTTENGGO AREA MANADO**



Diajukan oleh:

GLADYS KEKE RONDONUWU

NPM

: 130511309

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PASAL 51 AYAT (3) UNDANG
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG
KETENAGALISTRIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KETENAGALISTRIKAN DI PT PLN (PERSERO) WILAYAH
SULUTTENGGO AREA MANADO**



Diajukan oleh:

GLADYS KEKE RONDONUWU

NPM : 130511309
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui pada tanggal 26 Juli 2017

Dosen Pembimbing

G. Aryadi, SH.,MH

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



FX. Endro Susilo, S.H., LL.M

JURNAL

PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PASAL 51 AYAT (3) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KETENAGALISTRIKAN DI PT PLN (PERSERO) WILAYAH SULUTTENGGO AREA MANADO

Penulis : Gladys Keke Rondonuwu

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Gladysrondonuwu@yahoo.co.id

Abstract

The legal writing entitled “The Application of the Criminal Sanction of Article 51 Section 3 Indonesian Republic Acts Number 30 of 2009 on Electricity to the Perpetrators of Electricity in PT. PLN (Persero) Region of Suluttenggo, Area of Manado”. With the purpose of obtaining the data concerning the The Application of the Legal Sanction of Article 51 Section 3 Indonesian Republic Acts Number 30 of 2009 on Electricity in PT. PLN (Persero) Region of Suluttenggo, Area of Manado. The legal writing is a normative legal writing. The normative legal writing is a research that focus on legal positive law norm that is formed of the regulation of legislation that related with the criminal sanction to the perpetrators of electricity in PT. PLN (Persero) Region of Suluttenggo, Area of Manado. In taking the conclusion, a deductive thought process is used which is the legal reasoning that proceeds from a general proposition whose the truth has been known which ends in a new conclusion of a special nature. The legal writing will discuss The Application of the Criminal Sanction on Electricity. This sanction is not applied in PT. PLN (Persero) Region of Suluttenggo, Area of Manado, because it aims the internal regulations that led to the implementation of administrative sanction.

Keywords: Legal Sanctions, Electricity, Electric Crime

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara dengan potensi sumber daya alam yang cukup besar, baik berupa kekayaan alam hayati maupun kekayaan alam non hayati yang dalam hal ini dibutuhkan untuk menunjang pembangunan nasional.¹ Pada umumnya manusia baik

perorangan maupun sebagai masyarakat berusaha memenuhi kebutuhan dari berbagai alat pemuas atau pun dari sumber daya alam. Sumber daya alam dapat berubah menjadi hal-hal lain yang diperlukan masyarakat, salah satunya adalah tenaga listrik. Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional serta merupakan sumber energi yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Di era modern saat ini, hampir semua peralatan penunjang kebutuhan hidup menggunakan listrik sebagai dayanya. Pada dasarnya perkembangan inovasi-inovasi baru itu tidak hanya memunculkan perubahan gaya hidup

¹ Tim Suparman A. Diraputra, 2001, *Perumusan Harmonisasi Hukum Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm. 1.

baru di masyarakat tetapi ikut memunculkan permasalahan hukum, dan ini merupakan alasan mengapa hukum itu terus dibicarakan.

Pakar hukum tata negara, Robert McIver mengatakan, *“without law there is no order, and without order men are lost, not knowing where they go, not knowing what they do”* yang artinya tanpa hukum tidak ada perintah, dan tanpa perintah manusia hilang, tidak tahu kemana mereka pergi, tidak tau apa yang mereka perbuat². Tugas hukum adalah sebagai instrumen ketertiban dan keamanan bagi individu-individu yang sama-sama merindukan hidup tenang dan tentram.

Hukum diibaratkan sebagai rumah virtual untuk hidup bersama. Di satu sisi, ia diciptakan untuk melindungi kepentingan-kepentingan, tetapi di sisi lain menggendong resiko yang membatasi.³ Sebagai pemilik izin usaha penyedia tenaga listrik, PT PLN (Persero) perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu. Dalam proses peningkatan untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat muncul pihak-pihak yang melakukan kegiatan melawan hukum untuk memenuhi kebutuhan tenaga listriknya. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, mengatur mengenai sanksi administratif serta ketentuan pidana disertai sanksi pidana yang melekat didalamnya yang juga turut mempertegas pemberlakuan suatu larangan dalam undang-undang ini.

Salah satu ketentuan pidana yang diatur adalah mengenai penggunaan tenaga listrik yang bukan hak pelanggan

secara melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (3). Ini merupakan salah satu tembok yang membatasi tindakan pengguna listrik serta melindungi hak PT PLN (Persero) sebagai penyedia listrik negara.

Undang-undang merupakan salah satu dari produk hukum yang diperlukan demi mencegah terjadinya ketidakadilan akibat konflik kepentingan individual yang senantiasa muncul, dan untuk itulah Undang-Undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan harus menjadi jawaban atas perkembangan ketenagalistrikan yang terjadi di Indonesia karena hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat, atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati sehingga dapat membentuk tatanan masyarakat yang lebih baik⁴ kedepannya. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai penerapan sanksi pidana dibidang ketenagalistrikan. Dengan mengangkat judul “Penerapan Sanksi Pidana dalam Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ketenagalistrikan di PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo Area Manado”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah mengapa sanksi pidana dalam Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Pelaku tindak pidana ketenagalistrikan di PT PLN (Persero) Wilayah

² Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, 2006, *Tegakan Hukum Gunakan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 5.

³ Reza A. A. Wattimena, 2007, *Melampaui Negara Hukum Klasik*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. xiii.

⁴ Dr.Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 1.

Suluttenggo Area Manado tidak diterapkan.

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang penerapan sanksi pidana dalam Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Pelaku tindak pidana ketenagalistrikan di PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo Area Manado.

Tinjauan Pustaka

1. Penerapan Sanksi Pidana dalam Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Sanksi Hukum adalah tanggungan, tindakan, imbalan negatif berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum yang berupa undang-undang, peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah sebagaimana yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di Indonesia sendiri dikenal sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administratif. Sanksi pidana adalah pemberian nestapa yang sengaja ditanggungkan kepada pelaku oleh negara sebagai bentuk reaksi atas suatu delik⁵. Dalam KUHP ini terdapat istilah hukuman, istilah ini berasal dari kata “*straf*”⁶ yang bermakna sama dengan pemidanaan atau pemberian/penjatuhan pidana yang akhirnya menurut Soedarto penggantian kata “*straf*” menjadi

kata “pidana” lebih baik dari pada kata “hukuman”⁷.

Menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh dalam bukunya yang berjudul *Stelsel Pidana Indonesia*, beliau menulis bahwa apa yang dicantumkan dalam pasal 10 KUHP itulah yang dinamakan pidana, sedangkan yang lain daripada itu adalah tindakan⁸. Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana yang dimaksud oleh Prof. Mr. Roeslan Saleh, membedakan pidana menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Yang termasuk pidana pokok yakni:

- 1) Pidana Mati
- 2) Pidana Penjara
- 3) Pidana Kurungan
- 4) Pidana Denda
- 5) Pidana Tutupan

Pidana tambahan terdiri atas 3, yakni:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum perdata merupakan hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan yang satu terhadap yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak, sehingga dapat didefinisikan hukum perdata mengatur kepentingan/perlindungan antara orang satu dengan yang lain⁹.

Hukum perdata mengatur hubungan mengenai orang, keluarga, benda, perikatan, waris dan beberapa

⁵ Roeslan Saleh, 1978, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 5

⁶ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 5

⁷ *Ibid*, hlm. 6

⁸ *Ibid*, hlm. 6.

⁹ Djaja S. Meliala, 2012, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuasa Aulia, Bandung, hlm. 1.

hubungan keperdataan lainnya. Sanksi merupakan alat pemaksa untuk menaati suatu ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian, sehingga dapat diartikan bahwa alat pemaksa ini menjadi balasan atas ketidaktaatan pada perjanjian¹⁰. Dalam penegakannya, bentuk sanksi perdata yang diterapkan berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga¹¹ yang disesuaikan dengan bentuk putusan yang dijatuhkan.

Philipus M. Hadon berpendapat bahwa, sanksi merupakan suatu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi atas ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi¹². Sanksi hukum administrasi dapat dilihat pembagiannya berdasarkan segi sasarannya¹³,

Tujuan pemberian sanksi diatas sesuai dengan beberapa pendapat yang dikemukakan, seperti pendapat Jeremy Betham dan sebagian penulis modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang¹⁴. Begitu pun pendapat yang dikemukakan oleh Immanuel Kant dan gereja katolik yang menyatakan bahwa pembenaran dan tujuan

hukuman adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral¹⁵. Tidak hanya itu, penerapan sanksi bertujuan untuk mengembalikan kondisi yang telah terganggu akibat perbuatan yang melawan hukum. Dengan diterapkannya sanksi diharapkan dapat menyelesaikan konflik dalam masyarakat, meskipun tidak dapat dihindarkan adanya pandangan untuk melakukan pembalasan. Untuk itu dapat diketahui bahwa penerapan sanksi ini merupakan upaya mencegah terjadinya tindakan sendiri oleh masyarakat.

2. Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Ketentuan terkait ketenagalistrikan dimuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang juga merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan yang dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan keadaan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Tenaga listrik menjadi salah satu hasil dari kekayaan alam, yang juga merupakan objek dari ketenagalistrikan. Berdasarkan ketentuan umum undang-undang ketenagalistrikan, tenaga listrik adalah energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi

¹⁰ Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata Dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 89.

¹¹ *Ibid*, hlm. 91

¹² Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 89.

¹³ Ivan Fauzani Raharja, 2014, Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan, hlm.125
<https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2064>, diakses 7 Juni 2017

¹⁴ *Ibid*. hlm. 23

¹⁵ *Ibid*.

listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.

Reaksi terhadap sesuatu yang dilanggar adalah berupa sanksi atau ancaman hukuman. Sanksi administratif dalam undang-undang ini berupa teguran tertulis, pembekuan kegiatan sementara, dan/atau pencabutan izin usaha sedangkan untuk ketentuan pidana sendiri menegaskan imbalan berupa pidana penjara, denda serta diikuti keharusan ganti kerugian dalam beberapa tindak pidana tertentu.

Dalam menegakan hukum dibidang ketenagalistrikan, terdapat peran penyidik yang dijelaskan dalam bab XIII undang-undang ini. Penyidik yang dimaksud adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang lingkup tugasnya di bidang ketenagalistrikan.

Menghukum haruslah berlandaskan hukum, penghukuman yang dilakukan tanpa dasar hukum adalah tindakan sewenang-wenang¹⁶. Terdapat beberapa unsur dalam Pasal 51 (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, diantaranya:

1) Barang siapa

Unsur barang siapa adalah mereka yakni subjek hukum yang dapat dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum terkait suatu hal atau perbuatan yang dilakukan. Subjek hukum adalah orang perorangan (*Natuurlijk persoon*) serta badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam pandangan KUHPidana, yang dapat dibebani tanggung jawab pidana hanyalah manusia atau

pribadi alamiah¹⁷ sebagaimana diatur dalam Pasal 59 KUHPidana.

2) Penggunaan Tenaga Listrik

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan “penggunaan” sebagai suatu proses, cara perbuatan memakai sesuatu, pemakaian. Penggunaan tenaga listrik dilakukan oleh subjeknya yakni setiap orang atau badan usaha atau badan/lembaga lainnya. Pemakai tenaga listrik masih dibedakan menjadi 2(dua):

- a) Berdasarkan alas hak yang sah (konsumen)
- b) Tanpa berdasarkan alas hak yang sah (bukan konsumen)

Penggunaan tenaga listrik dapat dilihat dari golongan tarif tenaga listrik itu sendiri. Tarif tenaga listrik adalah tarif tenaga listrik untuk konsumen selaku pengguna listrik, yang mana penyediaan listriknya dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Tarif tenaga listrik dibedakan menjadi tarif tenaga listrik reguler (tarif yang dibayarkan setelah pemakaian tenaga listrik) dan tarif tenaga listrik Prabayar (tarif tenaga listrik yang dibayarkan sebelum pemakaian tenaga listrik). Saat menggunakan tenaga listrik, batasannya disesuaikan dengan tarif tenaga listrik.

3) Ilegal/Melawan Hukum

Terdapat dua pendapat yang berbeda mengenai yang dimaksud dengan melawan hukum. Pendapat pertama disebut berpandangan sempit

¹⁶ *Ibid*, hlm. 21

¹⁷ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.82

yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*hetsij met eens anders subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajibannya sendiri menurut undang-undang (*hetzij met des daders eigen wettelijke plicht*)¹⁸. Hal diatas juga selaras dengan yang dikemukakan oleh Hoffman yang menyimpulkan bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang.

Suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, walaupun juga dapat bertentangan dengan sesuatu yang menurut pergaulan kemasyarakatan adalah tidak patut, tidak merupakan perbuatan melawan hukum. Pendapat kedua yaitu berpandangan luas sebagaimana diperkenalkan pertama kali oleh Molengraaff, yang menyatakan bahwa seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila seseorang berbuat kepada orang lain, yang tidak patut menurut lintas pergaulan masyarakat (*wie 'anders handelt, dat in het maatschappelijk verkeer den eenenensch tegenover den ander betaamt, anders dan men met het oog op zijne medeburgers behoot te behandelen*)¹⁹.

Beberapa ketentuan dalam pasal mencantumkan atau menggunakan kata “melawan hukum”, namun ada juga yang tidak. Menurut para sarjana hukum

pidana, “melawan hukum” merupakan unsur tiap-tiap delik yang dinyatakan secara eksplisit atau tidak²⁰. Dalam bidang Perdata, terdapat pula istilah perbuatan melawan hukum yang sampai saat ini, didasari atas putusan Arrest pada tahun 1919²¹. Menurut Rutten, tidak perlu penjelasan terkait hal di karena dalam pergaulan dapat diketahui apa yang di pandang patut dan tidak. Putusan Arrest ini merupakan perluasan dari arti melawan hukum dalam Pasal 1401 BW. Meski demikian, pengertian melawan hukum dalam bidang hukum pidana tidaklah jauh berbeda dengan pengertian melawan hukum dibidang hukum perdata, namun orang tetap membuat pembedaan antara hukum perdata dan hukum publik, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik²². Konsekuensi terhadap hal tersebut ialah penentuan norma dalam hukum pidana harus lebih teliti daripada dalam hukum perdata. Perbedaan arti melawan hukum dalam bidang hukum pidana dibatasi dengan adanya Pasal 1 ayat 1 Sr (Pasal 1 ayat 1 KUHP).

3. Pelaku Tindak Pidana Ketenagalistrikan Di PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo Area Manado

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaku adalah orang, pemeran, pemain yang melakukan suatu perbuatan atau subjek yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu. Dalam suatu tindak pidana pengertian

¹⁸ Ny. Komariah Emong Sapardjaja, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 35

¹⁹ *Ibid*, hlm. 37

²⁰ Dr. A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 240

²¹ Ny. Komariah Emong Sapardjaja, *Loc Cit*, hlm. 39

²² *Ibid*, hlm. 45

perbuatan yang dimaksud bukanlah hanya yang berbentuk positif, melainkan melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang dan berbentuk negatif, artinya berbuat sesuatu yang semestinya tidak untuk dilakukan.²³

Dalam Pasal 55 (1) KUHP menyebutkan ada 4 golongan yang dapat dipidana, yakni:

- a. Pelaku (*Pleger*)
- b. Menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- c. Turut serta (*medepleger*)
- d. Penganjuran (*uitlokker*)

Pelaku (*Pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas suatu kejahatan. Dalam KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini, merumuskan mengenai mereka yang dipidana sebagai pelaku tindak pidana, yakni:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, mengatur mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana yang dibebankan kepada pelaku. Secara umum modus yang digunakan oleh pelaku

dalam melakukan tindak pidana ini berupa:

- a. Melakukan sambungan langsung dari tiang saluran rumah ke dalam instalasi rumah;
- b. Melakukan sambungan langsung pada kWh meter sehingga arus yang terbaca mengalami penurunan;
- c. Memutus pengukuran ke kWh meter pada jam-jam tertentu.

4. PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo Area Manado

PT PLN (persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang penyedia tenaga listrik yang berperan penting keberadaannya dalam hal pengadaan tenaga listrik yang meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.

Dalam peraturan yang sama, tepatnya di pasal 2 turut menjelaskan mengenai maksud dan tujuan pendirian PT. PLN (Persero)²⁴, yakni:

- 1) Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
- 2) Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk:
 - a) Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.

²³ Prof.Dr.Teguh Prasetyo, S.H.,M.Si., 2010, *Hukum Pidana*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 53.

²⁴ <http://www.pln.co.id/2011/03/30/profil-perusahaan>, diakses 26 Februari 2015

- b) Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai perkembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat
- 3) Merintis kegiatan-kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.
- 4) Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh kembang, Unggul dan Terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani menjadi visi dari perusahaan²⁵ ini. Adapun misi yang melengkapi, diantaranya:

- 1) Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
- 2) Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- 3) Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
- 4) Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

Satu-satunya perusahaan pelat merah di Indonesia yang diperkenankan menjalankan usaha ketenagalistrikan sesuai konsekuensi logis dari Undang Undang nomor 30 tahun 2009 dan PP No. 3/2005 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik²⁶,

PT PLN (Persero) membagi Indonesia menjadi 15 unit induk. Unit induk PLN Wilayah Suluttenggo merupakan cakupan dari wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo dengan kantor wilayah yang terletak di Jl. Bethesda No.32, Ranotana, Sario, Manado, Sulawesi Utara. Untuk wilayah Suluttenggo ini dibagi dalam beberapa area dan disertai 1 sektor dan 1 AP2B sistem. Khusus PT PLN (Persero) wilayah Suluttenggo area Manado dibagi pula menjadi 11 rayon yaitu: Rayon Manado Selatan, Rayon Manado Utara, Rayon Bitung, Rayon Airmadidi, Rayon Amurang, Rayon Tondano, Rayon Tomohon, Rayon Ratahan, Rayon Kawangkoan, Rayon Motoling dan Rayon Paniki.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Ketenagalistrikan di PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo Area Manado. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian hukum normatif menggunakan peraturan perundang-undangan, Bahan hukum sekunder penelitian ini terdiri dari pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, fakta hukum. Serta data yang diperoleh dari instansi resmi yakni PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo Area

²⁵ Ibid.

²⁶ Tim YLKI, 2010, *Bersikap Kritis Bertindak Cermat Panduan Konsumen dalam Menghadapi P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik)*, Penerbit Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jakarta, hlm. 4.

Manado. Bahan hukum diperoleh juga dari beberapa narasumber.

3. Hasil dan Pembahasan

Mendengar mengenai kata “Pencurian Listrik” merupakan hal yang begitu umum di kalangan masyarakat khususnya di Manado. Namun, sebenarnya hal tersebut hanyalah sebuah istilah umum yang dipakai masyarakat. Berbeda dengan penerapan di lapangan, yang dikenal adalah penggunaan tanpa hak dengan sebutan penyambungan liar. Menurut salah satu pegawai bagian P2TL, kedua istilah tersebut tetap merupakan satu kategori hanya saja tindakan yang dilakukan berbeda-beda. Di lingkup PLN (Persero) wilayah Suluttenggo Area Manado sendiri, hal yang terjadi adalah kelalaian dan pelanggaran.

Dari sekian banyak data temuan baik di tahun 2015 dan tahun 2016, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak-pihak terkait di Pengadilan negeri Manado sampai saat ini belum ada kasus yang masuk khususnya di input perkara pidana. Selain itu, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Manado. Namun penulis mendapatkan hasil yang sama. Menurut bapak **Theodorus Rumampuk, S.H.,MH**, selama ia bekerja dalam posisinya, tidak ada kasus penggunaan tenaga listrik ilegal atau yang biasa disebut “pencurian listrik” masuk di Kejaksaan Negeri Manado.

Untuk pelanggaran yang terjadi, dapat ditempuh melalui litigasi apabila telah menjalani proses namun mengajukan keberatan. Proses yang dimaksud disini adalah Ketika pelanggan/bukan pelanggan membuat surat keberatan maka akan diadili di pengadilan. Proses dalam pengadilan mirip dengan proses peradilan pada umumnya.

Penertiban pemakaian listrik yang terjadi di PT PLN (Persero) Wilayah

Suluttenggo Area Manado didasari atas Peraturan Direksi Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga listrik (P2TL). Dalam penertiban pemakaian tenaga listrik sebagaimana yang dimaksud dalam keputusan direksi, dibentuk regu bernama P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) atau yang dulu dikenal dengan nama OPAL (Operasi Penertiban Aliran Listrik) pada tahun 2000.

Tindakan ini dilakukan terhadap instalasi PLN atau instalasi pemakai tenaga listrik yang diduga melakukan tindakan penyimpangan terhadap pemakaian tenaga listrik secara tidak sah berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau terhadap kelainan-kelainan yang terjadi. Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian P2TL, cara mudah untuk mengetahui/menentukan target operasi adalah berdasarkan laporan dari warga, petugas PLN serta melalui beberapa aplikasi seperti aplikasi EIS untuk menentukan bukti pembelian token, serta aplikasi AP2T untuk mengetahui transaksi token oleh pengguna. Setelah diketahui, dilakukan target operasi (TO) yang dilakukan tersembunyi. Saat dilakukannya eksekusi ke lapangan, pelanggan yang bersangkutan harus hadir untuk menyaksikan proses pemeriksaan. Dalam tindakan eksekusi tersebut terdapat 4 lembar berita acara dengan warna putih, biru, kuning, dan merah yang disertai dengan bukti foto pelanggaran sebelum dan sesudah di bongkar, foto pelanggan yang menyaksikan, serta foto pelanggan menandatangani berita acara. Saat diberikan tagihan susulan, pelanggan yang tidak menerima dapat membuat surat keberatan ke bagian pelayanan pelanggan PT PLN (Persero) yang selanjutnya akan dibuatkan kronologi oleh pihak P2TL. Hal inilah yang nantinya dibahas di pengadilan melalui perdata.

Sanksi hukum yang diterapkan terhadap tindakan penggunaan listrik ilegal di PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo Area Manado dibedakan berdasarkan kategori, yakni:

- a. Pelanggan
- b. Bukan Pelanggan

Tidak terdapat kendala dalam penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana ketenagalistrikan karena siapa yang ketahuan melanggar otomatis akan dihukum. Hanya saja, penindakan terhadap pelaku tindak pidana ini tidak menerapkan sanksi hukum berupa sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Hal ini dikarenakan penyelesaiannya ditempuh dengan pembayaran Tagihan Susulan (TS).

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak **Utrecht P Tauna** selaku Supervisor Pemeliharaan Meter Transaksi PT PLN (persero) Area Manado Wilayah Suluttenggo, menurut beliau tidak diterapkannya sanksi pidana bukan semata-mata karena terdapat rasa kasihan saja melainkan karena upaya penindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di PT PLN (persero) Area Manado Wilayah Suluttenggo yakni berdasar pada Peraturan Direksi Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga listrik (P2TL). Hal yang sama dikemukakan oleh **Budi H. Panjaitan, SH., MH** selaku Kepala Kejaksaan Negeri Manado, berdasarkan pendapat beliau peraturan itu memang harus dipatuhi sebagaimana yang maksud dalam kutipan "*Fiat Justitia Ruat Caelum*". Pada kenyataannya, tidak semua hukum itu bersifat pasti. Jika semua dipidana, siapa yang hendak menanggung kehidupannya dilembaga pemasyarakatan, sampai saat ini negara lembaga pemasyarakatan sudah penuh dengan orang-orang yang melakukan tindak pidana. Lembaga pemasyarakatan seharusnya membina, tapi jika setiap

orang melakukan tindak pidana menerima sanksi pidana maka tidak mungkin pembinaan disana terjamin lagi. Sehingga banyak kasus-kasus yang penerapan sanksinya pidananya tidak dilaksanakan dan hanya berfokus pada penyelesaian diluar peradilan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penulisan penulis yang berupa pembahasan-pembahasan dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam mencari jawaban atas rumusan masalah sanksi pidana dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Ketenagalistrikan Di PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo Area Manado tidak diterapkan karena Pelaku perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 51 ayat (3) dibebani sanksi hukum berupa pembayaran Tagihan Susulan (TS) yang mengacuh pada Peraturan Direksi Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga listrik sebagai pengganti Keputusan Direksi Nomor 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, meskipun peraturan direksi ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Peraturan ini membebaskan sanksi hukum yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo Area Manado membebaskan sanksi administrasi kepada pelaku berupa keharusan membayar tagihan susulan sesuai penghitungan pemakaian ilegal. Mengingat salah satu maksud dan tujuan pendirian perusahaan ini adalah menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan, yang

selaras pula dengan tujuan utama perusahaan persero dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yakni mengejar keuntungan, sehingga sanksi hukum ini lebih menguntungkan perusahaan dari pada memberikan sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

5. REFERENSI

Buku :

Abdul Halim Barkatullah, 2013, *Hak-Hak Konsumen*, Penerbit Nusa Media, Bandung.

Djaja S. Meliala, 2012, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuasa Aulia, Bandung.

Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata Dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Bandung

Ny. Komariah Emong Sapardjaja, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung

Philipus M. Hadjon, dkk. 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada Univeristy Press, Yogyakarta

Reza A. A. Wattimena, 2007, *Melampaui Negara Hukum Klasik*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Ronny Rahman Nitibaskara, 2006, *Tegakan Hukum Gunakan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Suparman A. Diraputra Tim, 2001, *Perumusan Harmonisasi Hukum Tentang Pengelolaan Sumber Daya*

Alam, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Tim YLKI, 2010, *Bersikap Kritis Bertindak Cermat Panduan Konsumen dalam Menghadapi P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik)*, Penerbit Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jakarta.

Zainal Abidin Farid A., 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Website :

<http://www.djk.esdm.go.id/pdf/Buletin/Buletin%20Ketenagalistrikan%20No.45%20Vol.12%20Maret%202016.pdf>

<http://www.pln.co.id/2011/03/30/profil-perusahaan>

<https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2064>

Peraturan Perundang-undangan :

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.